

**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
DI PROVINSI BANTEN: STUDY KASUS DI DESA LONTAR KECAMATAN
TIRTAYASA, KABUPATEN SERANG DAN DESA CITEUREP, KECAMATAN
PANIMBANG, KABUPATEN PANDEGLANG**

***MODEL OF ECONOMIC EMPOWERMENT AT COASTAL PEOPLE
IN BANTEN PROVINCE: CASE STUDY IN LONTAR VILLAGE, TIRTAYASA
DISTRICT, SERANG REGION AND CITEUREP VILLAGE, PANIMBANG DISTRICT,
PANDEGLANG REGION***

(disubmit 1 Februari 2018, direvisi 1 Mei 2018, diterima 30 Juni 2018)

Agus Sjafari^{1*}, Kandung Sapto Nugroho², Arenawati Arenawati³, Oki Otaviana⁴,
Guntur Fernanto⁵

^{1*,2,3,4}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Corresponding Author: *agussjafari@untirta.ac.id

⁵Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten, sehingga dapat mengetahui model pemberdayaan ekonomi paling efektif bagi masyarakat pesisir di Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dan Desa Citeurep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik nelayan antara desa Lontar dan Citeurep. Ada perbedaan jenis pemberdayaan di kedua desa. Ada perbedaan komoditas pada kedua kelompok nelayan. Di Desa Lontar, jenis komoditas yang dihasilkan lebih bervariasi, perikanan tangkap, bandeng dan budidaya rumput laut dan usahatani rumput laut. Sedangkan di Desa Citeurep komoditi hanya menangkap ikan. Dalam perspektif kelompok, nelayan di Desa Lontar lebih terorganisir daripada nelayan di Desa Citeurep. Model pemberdayaan relatif yang dapat diterapkan pada dua kelompok nelayan tersebut adalah dengan Model Pendekatan Kelompok Berbasis Regional dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Pola pemberdayaan yang paling tepat adalah pola pemberdayaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan skema kemitraan seperti: peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, DPRD, dan swasta / perusahaan.

Kata kunci: pemberdayaan pesisir, kesejahteraan, kelompok nelayan

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of economic empowerment activities of coastal communities that have been done by the government of Banten province, thus to find out the most effective model of economic empowerment for coastal communities in the province of Banten. Metode used in this study is qualitative descriptive, with research sites in the village of Lontar sub District Tirtayasa, Serang Region and Citeurep Village, Panimbang sub District, Pandeglang Region. Informant's determination is done by purposive sampling. Primary data of this research is getting from indepth interview and observation. Secondary data getting from by literature study and documentation. The results of this study indicate that there are differences in the characteristics of fishermen between Lontar and Citeurep villages. There are differences in type of empowerment in both villages. There is a difference of commodities in both groups of fishermen. In Lontar Village, the types of commodities produced are more varied, capture fishery, milkfish and Sea Weed cultivation and seaweed farming. While in Citeurep Village the commodity is capture fish only. In group perspective, fishermen in Lontar Village are more organized than the fishermen in Citeurep Village. The relative empowerment model that can be applied to the two groups of fishermen is with the Regional-Based Group Approach Model taking into account the characteristics of the community that exist in their respective regions. The most appropriate pattern of empowerment is the empowerment pattern that involves all stakeholders using partnership schemes such as: the role of local government, universities, DPRD, and private / corporate

Keywords: coastal empowerment, welfare, group of fishermen

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekayaan laut yang berlimpah, baik sumber hayatinya maupun non hayatinya. Sebagai negara maritim dengan 70% wilayahnya adalah laut, seharusnya Indonesia menjadi negara maritim yang kaya akan sumber hayati laut terutama perikanan. Namun pada kenyataannya pada saat ini potensi laut belum dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan hidup para bagi masyarakat nelayan. Sejak 32 tahun yang lalu, kebijakan pembangunan perikanan tidak pernah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Implikasi dari tidak

adanya prioritas kebijakan pembangunan perikanan tersebut, mengakibatkan sangat minimnya prasarana perikanan di wilayah pesisir, terjadinya abrasi wilayah pesisir dan pantai, pengrusakan ekosistem laut dan terumbu karang, serta belum teroptimalkannya pemanfaatan (https://bappenas.go.id/files/2113/5216/0318/efrizal__20091015122211__2335__0.d oc.)

Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena di dalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya:

- a) Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
- b) Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja di sekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawa ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.
- c) Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal

(ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.

- d) Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap misalnya, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut.

Banten merupakan wilayah yang sangat strategis mengingat letak daerahnya berbatasan dengan ibu kota negara dan juga sebagai jembatan gerbang antara Jawa dan Sumatera. Sebagai wilayah daratan dengan luas 8.651,20 km² yang dikelilingi tiga lautan besar yaitu laut Jawa di bagian utara, laut Selat Sunda di bagian barat, dan laut Hindia di bagian selatan, maka Banten memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar dan bernilai ekonomi sangat tinggi. Sektor kelautan dan perikanan diperkirakan akan menjadi

tumpuan perekonomian di daerah di masa yang akan datang, sehingga peluang dan tantangan ini harus diwujudkan dan diimplementasikan secara nyata untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha penangkapan ikan, pengolahan ikan, dan usaha agribisnis perikanan tawar, laut dan payau. (<https://dkp.bantenprov.go.id/id/read/potensi>).

Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang tergolong miskin (Mubyarto, 1984; Imron, 2001; Kusnadi, 2002). Bahkan menurut Winahyu dan Santiasih (1993), jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain di sektor pertanian, nelayan (terutama buruh nelayan dan nelayan tradisional) dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin, walaupun tidak dapat dikatakan semua nelayan itu miskin. Kondisi ini menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat nelayan belum mampu secara optimal memanfaatkan semua potensi yang ada di sekitar lingkungannya untuk kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menganggap perlu untuk melakukan penelitian tentang evaluasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang telah dilakukan

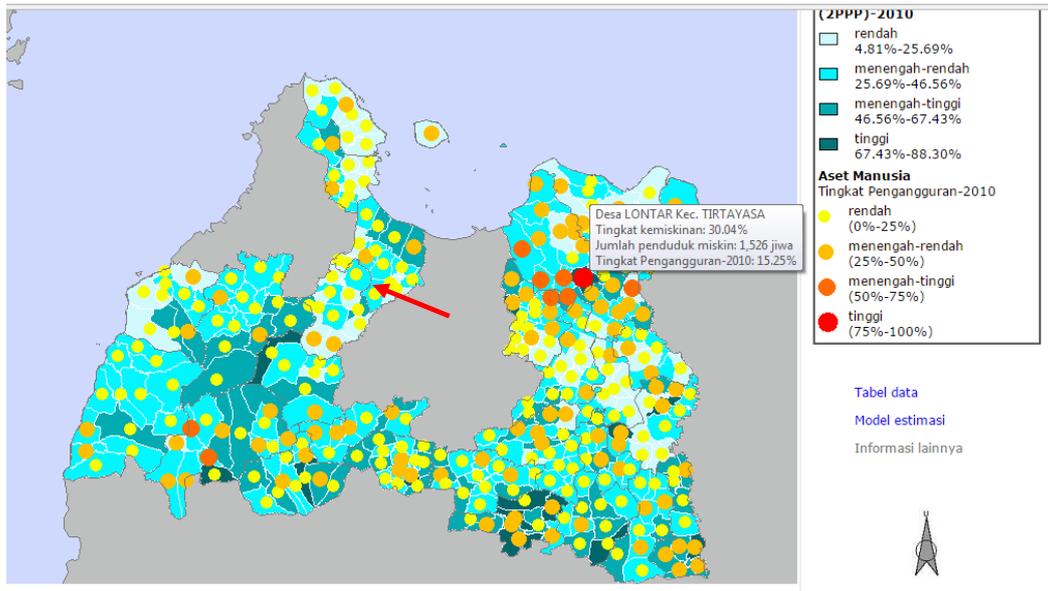
oleh pemerintah Provinsi Banten sehingga dapat menghasilkan rekomendasi langkah-langkah implementatif dalam bentuk model pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang dapat diterapkan di wilayah Provinsi Banten.

METODE PENELITIAN

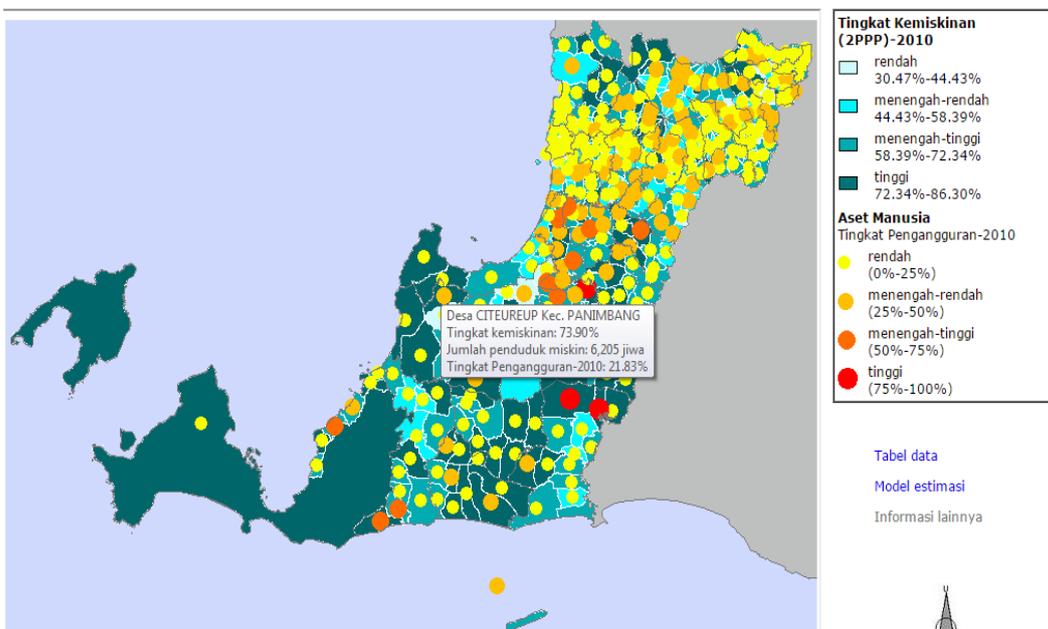
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan metode penelitian ini adalah untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif untuk menggali sisi holistisitas atau melihat keseluruhan dari data-data, fakta-fakta dan menuturkan data-data atau informasi yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Banten dengan mengambil lokus di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dan Desa Citeureup Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. Penunjukan lokasi ini berdasarkan kriteria tingkat kemiskinan di wilayah pesisir yang dikeluarkan oleh Semeru Institut berdasarkan indikator tingkat pengeluaran perkapita di bawah US\$2 dan

memperhatikan prosentase tingkat pengangguran di wilayah tersebut serta data kemiskinan berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang

dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Banten. Lokasi Penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Tingkat Kemiskinan (2PPP)-2010 menurut desa & Tingkat Pengangguran-2010, Kab. PANDEGLANG, Provinsi BANTEN



Gambar 1. Lokasi Penelitian

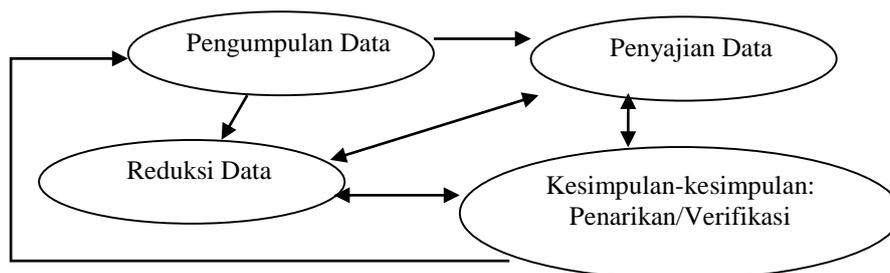
(Sumber gambar dari <http://www.indonesiapovertymap.org/index.php>)

Informan penelitian ini adalah: Ketua Koperasi Nelayan, nelayan, Kelompok Nelayan, Kepala Desa Pesisir, Kepala Tempat Pelelangan Ikan, Pedagang/Pengepul Ikan, Ketua Komunitas Nelayan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pandeglang, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Serang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Para pelaku ekonomi lainnya (produk olahan/produk turunan dari industri nelayan), Pengelola PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Untuk penentuan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yakni sampling bertujuan, dimana juga memperhatikan kelayakan responden untuk dijadikan informan kajian.

Sumber data dalam penelitian ini ialah: Sumber Data Primer diperoleh melalui *indepth interview*, yakni dengan wawancara mendalam pada key informan yang kompeten. Maupun hasil wawancara terstruktur pada responden terpilih dan Observasi, merupakan teknik pengumpulan

data dengan cara pengamatan secara langsung dengan obyek penelitian. Peneliti datang langsung ke lokasi penelitian dan mengobservasi obyek penelitian khususnya beberapa obyek penelitian yang datanya dinilai tidak valid. Sumber Data Sekunder melalui studi literatur/studi kepustakaan dan studi dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mempelajari dokumen-dokumen yang di dalamnya berisi tentang data dan informasi terkait.

Analisis Data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Data Interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Hubberman (1992) dimana Terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif yakni, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. proses kegiatan analisis data seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Model Analisis Interaktif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Lontar dan Desa Citeureup

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Lontar pada dasarnya terbagi ke dalam dua jenis, antara lain : 1) Pemberdayaan ekonomi yang mengandalkan atas bantuan melalui program yang dilakukan oleh pemerintah, dan 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lontar itu sendiri.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang selama ini sudah dilakukan oleh

pemerintah ada 2 (dua) program yaitu 1) Program Seribu Kampung Nelayan Mandiri, Tangguh, Indah dan Maju (Sekaya Maritim), dan 2) Program Peningkatan Usaha Mina Pedesaan (PUMP). Kedua program tersebut selama ini sudah mampu merubah wajah Desa Lontar dan dirasa sudah memberikan kemanfaatan yang sangat besar bagi masyarakat di Desa Lontar.

Program Sekaya Maritim telah dilakukan di Kabupaten Serang, Desa yang penerima Program Sekaya Maritim Tahun 2015 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Desa Penerima Program Sekaya Maritim Tahun 2015 di Kabupaten Serang

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1.	Lontar	Tirtayasa	Serang
2.	Alang-alang	Tirtayasa	Serang
3.	Sujung	Tirtayasa	Serang
4.	Tengkurak	Tirtayasa	Serang
5.	Susukan	Tirtayasa	Serang
6.	Bendung	Tanara	Serang

Data dari DKPSDM 2016

Program Sekaya Maritim yang diluncurkan KKP itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan juga kesejahteraan masyarakat

pesisir. Kabupaten Serang mendapat kesempatan pertama dalam menjalankan program ini. Pelaksanaan pembangunan Sekaya Maritim antara lain merealisasikan

rehabilitasi sarana infrastuktur jalan desa dan jalan lingkungan menuju tempat pendaratan pelelangan ikan (PPI), drainase dan sanitasi mandi, cuci serta kakus (MCK). Selain itu, juga pembuatan kapal, balai pendidikan latihan Sekaya Maritim serta bantuan alat tangkap.

Program Sekaya Maritim ini program peningkatan kehidupan nelayan, dan berharap nelayan bisa merasakan manfaat dari program ini. Realisasi dari pelaksanaan program sekaya maritim di Desa Lontar Kabupaten Serang tahun 2015 antara lain dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Pelaksanaan Program Sekaya Maritim (Seribu Kampung Nelayan Mandiri, Tangguh, Indah dan Maju) di Desa Lontar Tahun 2015

No	Lokasi Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Realisasi Volume Pekerjaan	Realisasi Fisik Tercapai	Keterangan
1	Desa lontar Blok 1	Perbaikan jalan lingkungan	Panjang 408,20 m, lebar 1-1,8 m	100%	
2	Desa lontar Blok 2	Perbaikan jalan lingkungan	Panjang 475,50 m, lebar 1-1,3 m	100%	
3	Desa lontar Blok 3	Perbaikan jalan lingkungan	Panjang 657,40 m, lebar 1,2-1,5 m	100%	
4	Desa Lontar-Alang alang	Perbaikan jalan desa	Panjang 2.365 m lebar 3,5 m	100%	
5	Desa lontar	Pembangunan gedung/balai sekaya maritim	Luas bangunan 250m ² (satu lantai)	63,76%	Sisa pekerjaan yang belum selesai, disusul untuk dapat dilanjutkan pada tahun 2016 melalui DPA-P sumber dana APD Kabupaten Serang

Data DKPSDM kabupaten Serang 2016

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya yang juga dilakukan oleh pemerintah adalah Program Peningkatan Usaha Mina Pedesaan (PUMP). Program Peningkatan Usaha

Mina Pedesaan (PUMP) merupakan perwujudan dari komitmen nasional dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. PUMP pada dasarnya telah hadir ditengah-tengah masyarakat

Kabupaten Kabupaten Serang pada tahun 2010. PUMP yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral (DKPESDM) Kabupaten Serang ini di tempatkan di desa-desa atau wilayah pesisir di teluk Banten. Sebagai pertimbangan desa-desa tersebut memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan. Dari beberapa desa tersebut salah satunya desa Lontar, dimana desa ini merupakan desa dengan tingkat kehidupan masyarakatnya yang masih terbelang miskin. Sebagian besar penduduknya hidup di sektor nelayan. Kehidupan Nelayan yang sangat memprihatinkan dibawah garis kemiskinan membuat pemerintah memberikan perhatian dengan memberi program yang diharapkan mampu memberdayakan yaitu salah satunya PUMP di Lontar.

Sesuai dengan kebutuhannya PUMP merupakan suatu program pemberdayaan yang dibentuk kelompok dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang secara khusus berkonsentrasi pada usaha-usaha pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan komunitas tersebut. PUMP yang ada di Desa Lontar berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan kepada kelompok masyarakat penerima BLM. Kelompok masyarakat tersebut sebelumnya telah diidentifikasi, diseleksi dan diverifikasi oleh Tim Pemberdayaan

masyarakat melalui proposal pengajuan dana yang dilakukan oleh kelompok dengan di dampingi oleh Tenaga Pendamping dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral (DKPESDM) Kabupaten Serang sesuai dengan potensi desa yang ada. Tiap kelompok terdiri dari 10 orang yaitu terdiri dari masyarakat berSDM artinya mampu membimbing masyarakat lemah, dan masyarakat miskin itu sendiri. Kelompok terdiri atas ketua, bendahara, dan anggota. Pada program ini tersaring 7 Kelompok Masyarakat penerima BLM karena telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Tujuh Kelompok Masyarakat itu antara lain : (1) KUB Bahari Jaya Bersatu, (2) KUB Lontar 2, (3) KUB Mustika Laut, (4) KUB Bahari Jaya, (5) KUB Sumber hidayah 1, (6) KUB Cita Raya 1, (7) KUB Cita Raya2.

Dana BLM yang diterima oleh ke-7 Kelompok tersebut dialokasikan pada kegiatan Pembudidayaan dan pengolahan Rumput laut, penangkapan ikan, konservasi laut, dan infrastruktur lingkungan. Selama kegiatan berlangsung kelompok masyarakat diberikan pelatihan dan keterampilan secara rutin dan diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta membentuk SDM yang mandiri.

Sasaran PUMP adalah masyarakat bidang kelautan dan perikanan, yaitu orang yang bertempat tinggal di wilayah pesisir

atau di luar pesisir yang memiliki kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. Berikut

ini Tabel 3 menunjukkan Kelompok Sasaran PUMP.

Tabel 3. Kegiatan Program Kelompok Masyarakat Penerima PUPM Desa Lontar

No	Nama Kelompok	Kegiatan Program
1	KUB Bahari Jaya Bersatu	Pembuatan Gill Net (Jaring Kejer)
2	KUB Lontar	Mesin perahu 1-3 Gt
3	KUB Mustika Laut	Pembudidaya Rumpu laut
4	KUB Bahari Jaya	Pengolah Rumput laut
5	KUB Sumber Hidayah 1	Pembuatan Gill Net (Jaring Kejer)
6	KUB Cita Raya 1	Pembuatan Gill Net (Jaring Kejer)
7	KUB Cita Raya 2	Pembudidaya Rumpu laut

Dari realisasi bantuan tahun 2014 pada tabel 3 dapat dilihat bahwa program pemberdayaan kelompok sudah berjalan, KUB yang dibentuk untuk menyalurkan bantuan sudah menysasar kepada kelompok-kelompok nelayan yang memenuhi syarat proses mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan kelompok.

Selain program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diinisiasi dan dilakukan oleh pemerintah, terdapat program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diinisiasi dan dilakukan oleh masyarakat nelayan sendiri yaitu dengan membuat kelompok – kelompok usaha dengan maksud untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antar nelayan, di samping itu juga dimaksudkan untuk memudahkan untuk memperoleh bantuan dari pemerintah juga. Kelompok – kelompok yang selama ini sudah berjalan

baik khususnya pada nelayan rumput laut. Saat ini anggota nelayan rumput laut di Desa Lontar terdapat sekitar 800 orang yang terbagi ke dalam 80 kelompok dimana masing – masing kelompok beranggotakan 10 orang. Awal – awal terbentuknya kelompok nelayan rumput laut anggota masing – masing kelompok 20 orang, namun beberapa tahun terakhir ini atas saran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang, maka jumlah kelompoknya diperbanyak dengan memperkecil jumlah anggota masing – masing kelompok dari 20 orang menjasi 10 orang . Kelompok – kelompok tersebut saat ini sudah didaftar ke notaris dan Kemenkumham dan berbadan hukum. Dengan berbadan hukumnya kelompok – kelompok tersebut, selanjutnya legalitas kelompok – kelompok tersebut dapat dipergunakan untuk mengajukan bantuan

dari pemerintah. Bantuan – bantuan yang selama ini ada hampir semuanya dari pemerintah daerah, sedangkan dari swasta belum ada bantuan.

Sejak adanya pelatihan tentang usaha rumput laut pada tahun 2010 yang lalu, sebagian besar nelayan ikan berpindah untuk menjadi nelayan rumput laut, dikarenakan potensi dan prospek pengelolaan rumput dinilai sangat baik dan menjanjikan. Tahun 2016 terdapat bantuan pembibitan sebanyak 4 ton per kelompok serta bantuan tambang untuk membuat jalur rumput laut. Kelompok pada dasarnya tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, bantuan dana yang diberikan sebenarnya hanya untuk biaya operasional untuk mengangkut alat – alat yang diberikan kepada para kelompok nelayan.

Pelatihan yang selama ini dilakukan kepada kelompok – kelompok nelayan rumput laut dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), pelatihan mandiri dari nelayan – nelayan yang sudah berhasil dan s Sekolah Tinggi Perikanan. Pelatihan – pelatihan tersebut sifatnya sharing pengetahuan dan menambah keterampilan baru dalam rangka meningkatkan produksi khususnya rumput laut. Salah satu pelatihan kepada nelayan rumput laut adalah pelatihan makanan produk olahan misalnya saja seperti dodol, bakso, saos . Dengan adanya pengembangan jenis pelatihan tersebut, masyarakat di Desa Lontar tidak

hanya terampil dalam mengelola tangkapan ikan dan rumput laut saja, melainkan juga terampil untuk membuat makanan dengan berbahan baku ikan dan rumput laut. Penjualan dari makanan – makanan hasil olahan tersebut dipasarkan di Desa Lontar dan sekitarnya.

Pola kemitraan yang selama ini dilakukan oleh nelayan yang ada di Desa Lontar relatif dilakukan secara personal oleh para nelayan dan tidak terorganisir secara kelompok, meskipun diantara anggota kelompok nelayan saling memberikan informasi terkait dengan pola kemitraan usahanya. Para nelayan, khususnya nelayan rumput laut sudah melakukan kemitraan usaha dengan beberapa perusahaan seperti : perusahaan Agarindo, Swallow, Gomindo dan beberapa perusahaan di luar Provinsi Banten. Penentuan harga selama ini ditentukan oleh kesepakatan antara nelayan dan perusahaan sesuai dengan harga pasar.

Kondisi yang terjadi di Desa Lontar justru sangat berbeda dengan yang terjadi di Desa Citeureup. Gerak roda kesejahteraan ekonomi di Desa Citeureup relatif tidak didominasi oleh sekelompok elit tertentu, walaupun ada kekuatan-kekuatan yang cukup menonjol namun tidak terlalu signifikan, sehingga relatif cukup merata (kurang). Belum adanya BUMDes di desa ini ikut berkontribusi pada negatifnya kondisi ekonomi terlebih koperasi yang ada

yakni Koperasi Alinda juga tidak menunjukkan pergerakan aktifitas ekonomi yang berarti. Sehingga sampai sekarang ini belum ada kerjasama antara koperasi dengan dunia perbankan, sehingga nelayan biasanya terjebak pada aktifitas bank keliling (rentenir dengan bunga harian). Sehingga bisa dikatakan bahwa kondisi nelayan di Desa Citeureup kondisi terbengkalai.

Saat ini para nelayan di Desa Citeureup juga mendapatkan fasilitas pemberdayaan berupa pelatihan bagi nelayan yang disediakan oleh dinas terkait berupa pelatihan pembuatan olahan hasil laut, seperti pembuatan abon ikan tongkol, pembuatan kerajinan kerang laut sebagai cinderamata, walaupun nelayan di Desa Citeureup tidak mendapatkan jaminan keselamatan nelayan di laut, dan atau di darat dengan tujuan keperluan sesuai pekerjaan (nelayan) pada tahun pertama diberikan gratis oleh Kementerian KKP dengan besaran premi sebesar kurang lebih Rp. 157.000 ,- (seratur lima puluh tujuh ribu rupiah) seperti yang didapatkan nelayan di Desa Lontar.

Hal yang paling mendasar terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa aktivitas kelompok dapat dikatakan sangat kurang bahkan tidak ada. Kegiatan yang mengatasnamakan kelompok nelayan saat ini dikendalikan oleh TPI yang ada di Desa Citeureup.

Keberadaan kelompok nelayan yang ada hanya bersifat “formalitas” dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan – bantuan yang mengatasnamakan kelompok nelayan saat ini, semua diinisiasi oleh pengelola TPI.

Salah satu kelompok nelayan yang saat ini ada adalah KJA (kelompok jaring apung) ada 4 orang, ada juga kelompok nelayan bernama kemuning d anggotanya 10, dan pengurusnya 3 orang. Kondisi kelompok dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik. Beberapa kelompok tersebut tidak memiliki kegiatan yang jelas. Kelompok – kelompok sebagian besar hanya difungsikan untuk mengajukan bantuan – bantuan kepada pemerintah. Demikian juga dengan keberadaan dan eksistensi koperasi nelayan di Desa Citeureup. Masyarakat di Desa Citeureup tidak memiliki koperasi sendiri yang mandiri.

Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat

Sejak tahun 2004 desa Lontar merupakan salah satu desa yang menerima Program Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Nelayan Kelautan, atau disingkat MFCDP (*Marginal Fishing Community Development Program*). Program ini adalah kerjasama antara Bappenas, World Bank dan Pemerintah Daerah Kabuapten Serang. MFCDP

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan dalam mengelola sumber daya perikanan yang lebih baik melalui upaya pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan yang diberikan adalah dengan pemberian Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat. Pemanfaat Dana BLM dalam program MCDFC adalah 1) Penerapan Dana untuk teknologi Tepat Guna sebesar 75 %, dan 2) Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi sebesar 25%.

Pemanfaat dana dalam program ini sudah tepat sasaran sudah digunakan sesuai dengan kemanafaatannya. Hanya saja belum semua masyarakat nelayan yang miskin dapat karena dana jumlahnya terbatas.

Program pemberdayaan masyarakat pesisir selanjutnya adalah program Sekaya Maritim. Program ini lebih diarahkan untuk pembangunan infra struktur yang menunjang bagi perekonomian daerah ini. Program ini sudah berjalan dengan efektif, hanya saja program ini belum menyeluruh, dalam arti bahwa letak desa nelayan seperti desa Lontar biasanya dari ibu kota. Untuk mencapai desa tersebut akan melewati beberapa desa. Desa-desa ini sebaiknya juga mendapatkan program Sekaya Maritim, guna menunjang infra struktur kearah kawasan pesisir.

Program lain yang didapatkan oleh masyarakat di wilayah pesisir adalah berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Pemberian bantuan oleh DKP bagi masyarakat nelayan, diberikan kepada nelayan pengangkap ikan dan masyarakat pengolah hasil. Bagi nelayan berupa pelatihan, bimbingan teknis dan pemberian alat tangkap. Program ini bagi masyarakat nelayan dirasakan sudah cepat sasaran, hanya saja pemberian bantuan tidak merata bagi nelayan kecil, karena terdapat juga nelayan yang kategori bukan nelayan kecil, mendapatkan juga alat tangkap.

Sementara itu pemberdayaan bagi masyarakat yang mengolah hasil perikanan dan rumput laut dapat dikatakan sudah tepat sasaran, karena memang program tersebut sudah mengena sesuai dengan manfaat program. Orang-orang yang mendapatkan bantuan dalam program pemberdayaan sudah benar, hanya saja peralatan yang diberikan oleh DKP Kabupaten Serang belum termanfaatkan dengan baik, bahkan beberapa alat tidak digunakan, seperti mesin oven, mesin giling dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kapasitas produksi tidak banyak, sehingga akan lebih hemat waktu dan listrik jika diolah menggunakan alat yang manual.

Tidak berbeda dengan desa Lontar, Desa Citeurep juga telah mendapatkan program-program pemberdayaan. Hanya saja masyarakat banyak yang tidak

mengetahui program tersebut. Program bantuan bagi nelayan dari pemerintah Pusat tidak sampai pada nelayan di wilayah Citeurep, jika pun ada bantuan adalah dengan mengirimkan proposal pengajuan bantuan, yang dilakukan oleh penanggung jawab TPI. Sehingga pemanfaat bantuan lebih diarahkan bagi kebutuhan TPI seperti bantuan container untuk pengawet ikan. Masyarakat sendiri tidak merasakan adanya bantuan tersebut.

Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir

Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. Partnership atau kemitraan haruslah disegerakan, baik itu antara nelayan dengan nelayan, nelayan dengan pemerintah, nelayan dengan swasta, nelayan dengan NGO maupun nelayan dengan perguruan tinggi. Ini akan menjadi pendorong atau pengungkit gerak dinamika nelayan. Di kedua lokus penelitian, masih minim kemitraan atau kerjasama dengan pihak luar.

Desa Lontar dan Desa Citeureup yang menjadi lokus penelitian memiliki

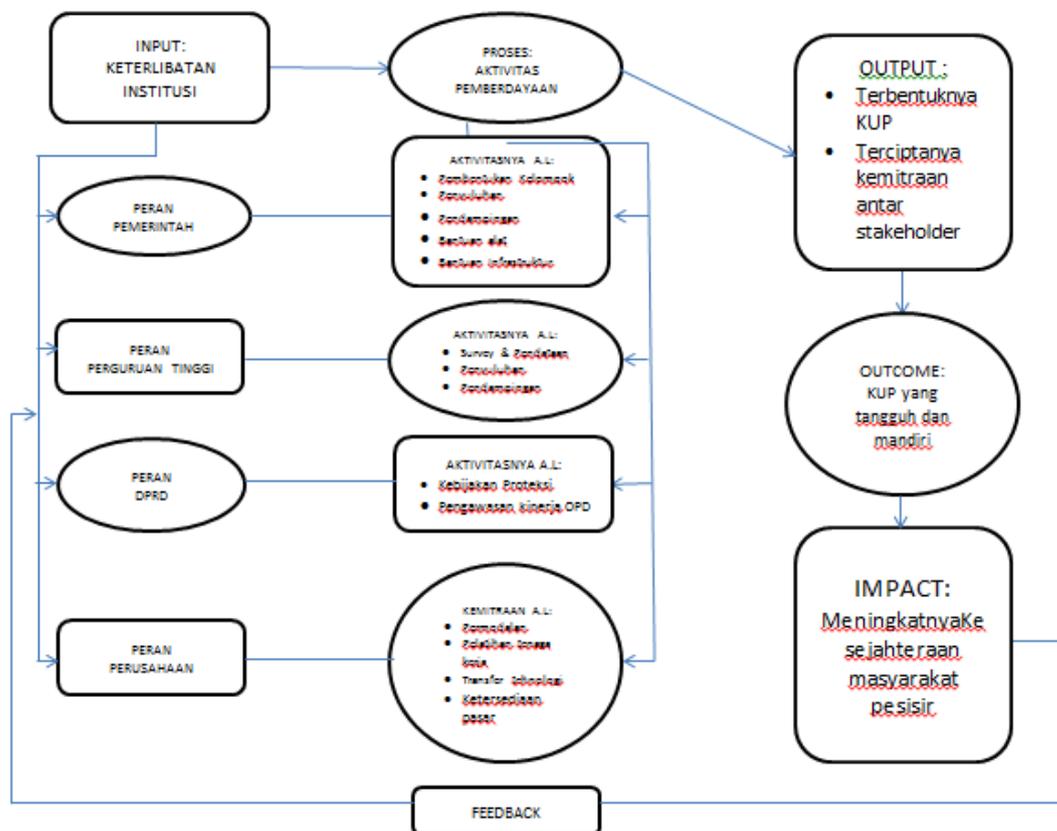
karakteristik yang berbeda namun upaya pemberdayaan masyarakat Desa Pesisir di Provinsi Banten disajikan dalam bentuk model. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan kelompok berdasarkan karakteristik kewilayahan. Model pemberdayaan yang pertama adalah Model Pendekatan Kelompok berbasis kewilayahan yang ada di Desa Lontar, secara lebih terperinci model tersebut dapat dijelaskan pada Gambar 3.

Berdasarkan gambar model pada Gambar 3, ada empat peran institusi yang harus dilakukan untuk menghasilkan impact berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kolaborasi keempat institusi itu yakni Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, termasuk pemerintahan Desa), Akademisi (Perguruan Tinggi), Unsur Legislatif (DPRD) serta Bisnis (Perusahaan) diarahkan pada intervensi program dan kegiatan yang digulirkan di kawasan pesisir. Peran masing-masing instuti tersebut yakni:

- a. Pemerintah: pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok, penyuluhan, pendampingan, bantuan alat, bantuan infrastruktur
- b. Perguruan tinggi: survey & pendataan, penyuluhan, pendampingan

- c. Legislatif: kebijakan proteksi, pengawasan kinerja opd dan keberpihakan anggaran
- d. Bisnis/perusahaan: permodalan, pelatihan tenaga kerja, transfer teknologi, ketersediaan pasar.

Gambar. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Provinsi Banten.



Gambar 3. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Provinsi Banten

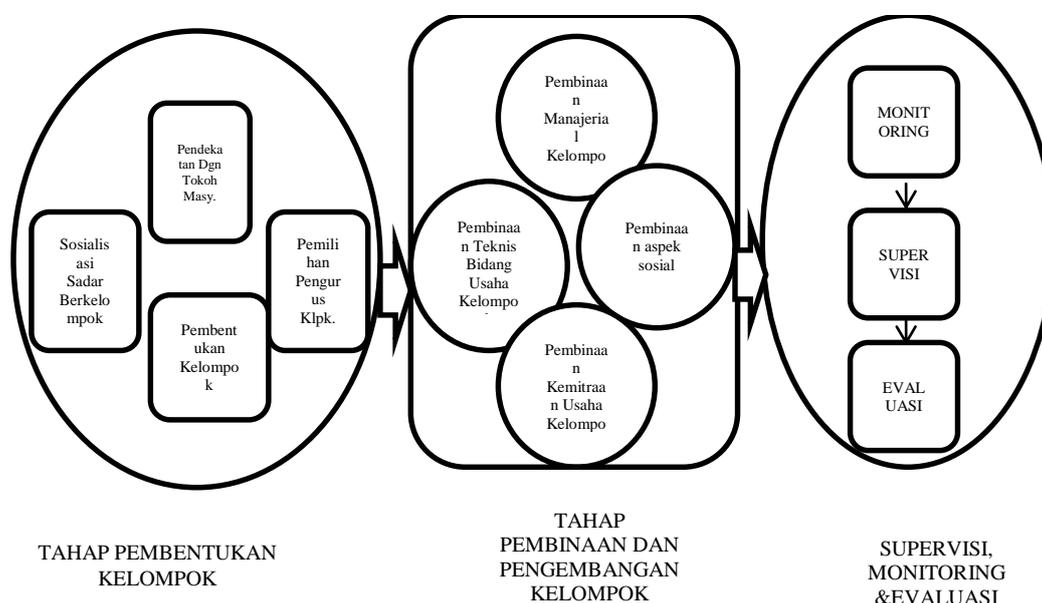
Rancangan model pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Provinsi Banten mengacu kepada konsep teori sistem untuk memudahkan di dalam mendeskripsikan masing proses dalam model tersebut. Konsep teori sistem dapat diartikan sebagai suatu cara berpikir dengan menggunakan konsep sistematis dan sistemik (menyeluruh).

Pendekatan yang digunakan dalam memberdayakan masyarakat pesisir adalah

menggunakan pendekatan kelompok. Khusus masyarakat pesisir di Desa Citeureup menunjukkan bahwa kelompok masyarakat khususnya para nelayan tangkap yang menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakatnya ternyata belum terbentuk dan belum berjalan secara efektif. Dengan demikian perlu ada restrukturisasi organisasi/kelompok nelayan serta dilanjutkan dengan proses pembinaan dan pengembangan kelompoknya dalam

menunjang usaha perikanan nelayan tangkap yang lebih mandiri dalam

menunjang perekonomian bagi masyarakat di Desa Citeureup.



Gambar 4. Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Desa Citeureup

Selanjutnya Penumbuhan Kelompok Usaha Perikanan (KUP) adalah proses inisiasi dan fasilitasi tumbuhnya suatu kerjasama yang bersumber dari kesadaran pelaku utama dengan cara bergabung dalam kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan prinsip kesamaan kepentingan, sumberdaya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antara pelaku utama, sehingga dapat merupakan faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, dimana setiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari apa yang ada dalam kelompok.

Beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Citeureup adalah dimulai dengan pembentukan kelompok, pembinaan dan pengembangan kelompok, serta kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap keberadaan kelompok nelayan tersebut.

Pada *Tahap Pertama*, yaitu Tahap Pembentukan Kelompok Usaha Perikanan (KUP). Kelompok Usaha Perikanan (KUP) dapat tumbuh dan terbentuk dengan sendirinya (tanpa bantuan pihak luar) dan dapat pula terbentuk dengan bantuan pihak luar. Agar pelaku utama dapat membentuk kelompok, perlu adanya rangsangan dan

motivasi, antara lain dengan cara: a) sosialisasi penumbuhan Kelompok Usaha Perikanan (KUP), b) pertemuan lanjutan yang dihadiri oleh pemerintah setempat tokoh masyarakat, pelaku utama (nelayan), pelaku usaha perikanan untuk menumbuhkan kelembagaan dengan memilih dan menyusun struktur organisasi dan penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, c) penguatan Kelompok Usaha Perikanan (KUP) oleh pejabat wilayah setempat (lurah/kepala desa/sejenisnya) dan dilaporkan kepada badan pelaksana penyuluhan/dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota.

Pada *Tahap Kedua*, Yaitu Tahap Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Perikanan (KUP), yang terdiri dari: 1) Pembinaan teknis bidang usaha kelompok, 2) Pembinaan manajerial kelompok, 3) Pembinaan aspek sosial, dan 4) Pembinaan kemitraan usaha kelompok.

Pembinaan teknis bidang usaha Kelompok Usaha Perikanan (KUP) lebih menekankan kepada kegiatan pembinaan yang berhubungan langsung dengan pengembangan teknis jenis usaha bersama utama yang menjadi prioritas dalam kelompok tersebut serta aspek – aspek utama pendorong terhadap keberhasilan bidang usaha kelompok tersebut, antara lain: a) penguatan modal usaha; b) penangkapan ikan; c) budidaya ikan; d) jasa dan industri perikanan; e) peningkatan

kapasitas masyarakat, kelembagaan dan aparat; f) pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (konservasi); g) pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan; h) pengolahan dan pemasaran hasil; i) penguatan kelembagaan usaha; j) kontribusi pelaku utama kelautan dan perikanan; k) identifikasi potensi wilayah dan sumberdaya perikanan yang ada di lingkungannya; l) pemilihan teknologi yang dibutuhkan; dan m) peningkatan kapasitas produksi dan mutu hasil.

Beberapa kegiatan pembinaan manajerial kelompok antara lain: a) membuat program dan rencana kerja kelompok, b) penguatan modal dan keberlanjutan usaha kelompok, c) pengembangan usaha kelompok, dan d) pengembangan pemasaran hasil dan bimbingan manajerial lainnya.

Pembinaan aspek sosial merupakan kegiatan yang lebih menekankan kepada penguatan karakter masing – masing orang yang terlibat dalam kelompok tersebut yang menyangkut karakter individual dan karakter kelompok di dalam usaha menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat setempat yang terdiri dari: a) kesadaran hukum; b) pembinaan kader (anggota kelompok); c) taat perjanjian (komitmen

berkelompok); dan d) pembinaan hubungan dengan kelembagaan lain.

Pembinaan kemitraan Kelompok Usaha Perikanan (KUP) merupakan kegiatan pembinaan dalam hal penguatan kelompok di dalam melakukan kemitraan dengan perusahaan – perusahaan mitra untuk lebih mengembangkan modal usaha dan keuangan kelompok, jenis usaha kelompok, jaringan usaha kelompok, jaringan pemasaran usaha kelompok dan pembinaan kemitraan lainnya. Pembinaan kemitraan usaha kelompok ini diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten atau Kota dengan melibatkan pelaku bisnis di bidang perikanan serta lembaga penyedia keuangan agar kelompok usaha perikanan tersebut menjadi lebih mandiri. Jenis – jenis pelatihan kemitraan kelompok usaha perikanan tersebut antara lain: 1) Pola kemitraan inti – plasma, 2) Pola Kemitraan subkontrak, 3) Pola Kemitraan dagang umum, dan 4) Pola kemitraan kerjasama operasional.

Pada *Tahap Ketiga*, yaitu kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi. Kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha perikanan (KUP) dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan sampai benar – benar KUP tersebut sudah berdaya dan mandiri. Dalam melaksanakan kegiatan ini dapat sekaligus dilakukan bersamaan dengan supervisi.

Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan arah pembinaan dari penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha perikanan (KUP).

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh: 1. Pejabat yang ditunjuk pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Provinsi/ Kabupaten/ kota yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kelautan dan perikanan. 2. Pejabat yang ditunjuk pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terhadap kegiatan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 3. Pejabat yang ditunjuk pada badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan/dinas kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Waktu dan metode pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi maupun analisa dokumen/laporan dan dilakukan secara berkala (triwulan, semester, dan tahunan) dan hasilnya disampaikan secara berjenjang.

Aspek-Aspek Monitoring dan Evaluasi Aspek-aspek dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi: 1.

Dokumen Proses Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan; 2. Pola Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan; 3. Tahapan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan; 4. Stratifikasi Kemampuan dan Klasifikasi Kelembagaan pelaku utama perikanan; 5. Penilaian dan Pengukuhan Kelas Kelembagaan Pelaku utama perikanan.

Secara substansial dapat disimpulkan bahwa model pendekatan kelompok berbasis kewilayahan yang ada di Desa Citeureup Provinsi Banten ini pada dasarnya sangat cocok untuk diterapkan pada masyarakat pesisir khususnya nelayan tangkap yang secara karakteristik kondisinya seperti di Desa Citeureup Provinsi Banten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan antara lain:

1. Terdapat perbedaan komoditas nelayan yang ada di Desa Lontar dan Desa Citeureup Provinsi Banten, dimana Desa Lontar terdiri dari komoditas nelayan tangkap, nelayan budidaya ikan, nelayan budidaya rumput laut, dan nelayan yang bergerak di pengolahan bahan baku ikan, sedangkan di Desa Citeureup sebagian

besar nelayannya termasuk dalam kategori nelayan tangkap.

2. Dalam persepektif kelompok, masyarakat nelayan yang ada di Desa Lontar relatif lebih terorganisir dengan lebih baik dibandingkan dengan masyarakat nelayan yang ada di Desa Lontar Provinsi Banten.
3. Pendekatan yang relatif lebih sesuai digunakan dalam model pemberdayaan masyarakat nelayan baik di Desa Lontar Maupun di Desa Citeureup adalah dengan menggunakan Model Pendekatan Kelompok Berbasis Kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang ada pada wilayah masing – masing.
4. Pola pemberdayaan yang relatif berhasil dilakukan adalah pola pemberdayaan yang melibatkan semua stakeholder dengan menggunakan pola kemitraan (partnership) antara lain: peran dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, DPRD, dan swasta/perusahaan. Apabila kesemua stakeholder tersebut memerankan kegiatan pemberdayaan secara simultan, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir akan berhasil seperti halnya yang sudah berlangsung di Desa Lontar.
5. Pola pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Citeureup dimulai dari

pembentukan kelompok nelayan, pembinaan dan pengembangan kelompok, serta dilakukan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi.

6. Terdapat 2 (dua) model pemberdayaan yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu (1) Model Pemberdayaan Melalui Pendekatan kelompok berbasis kewilayahan Lontar dan (2) Model Pemberdayaan Melalui Pendekatan kelompok berbasis kewilayahan Citeureup. Kedua model pemberdayaan tersebut dapat diadaptasi di beberapa wilayah yang lain apabila wilayah –wilayah lainnya tersebut memiliki karakteristik kewilayahan dan karakteristik masyarakat yang relatif sama dengan kedua wilayah tersebut.

REKOMENDASI

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang ada di atas tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan khususnya oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten :

1. Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi perlu melakukan pemetaan wilayah untuk mengidentifikasi wilayah – wilayah pesisir untuk melihat karakteristik kewilayahan, menemukan potensi

komuditas perikanan unggulan yang dapat dikembangkan sehingga dapat menentukan model pemberdayaan yang cocok sesuai dengan potensi wilayah dan karakteristik masyarakat pada masing – masing wilayah tersebut.

2. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, selanjutnya Pemerintah daerah memiliki strategi pelaksanaan (*action strategy*) terkait 2 (dua) model pemberdayaan yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu: (1) Model Pendekatan Kelompok Berbasis Kewilayahan seperti yang ada di Desa Lontar, dan (2) Model Pendekatan Kelompok Berbasis Kewilayahan seperti yang ada di Desa Citeureup tersebut.
3. Pemerintah daerah hendaknya mampu membuat rumusan strategi bersama – sama dengan para stakeholder yang terkait (perguruan tinggi, DPRD, dan korporat/perusahaan) untuk memberikan peran yang proporsional kepada masing – masing stakeholder tersebut dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir di Provinsi Banten.
4. Hal yang penting lainnya adalah pemerintah daerah perlu melakukan penyuluhan yang intensif terhadap masyarakat pesisir di Provinsi Banten, dimulai dari kegiatan sosialisasi program pemberdayaan, pelatihan

program pemberdayaan, pendampingan program pemberdayaan, pemberian bantuan modal usaha, pelatihan manajemen kelompok dan manajemen usaha perikanan, pelatihan kemitraan dan beberapa model penyuluhan lainnya yang mampu menciptakan Kelompok Usaha Perikanan (KUP) menjadi lebih mandiri dan berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

Imron, Masyhuri (ed). 2001. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Yogyakarta: Media Pressindo.

Kusnadi. 2002. Akar Kemiskinan Nelayan. Yogyakarta : LKIS.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.

Mubyarto, et. al. 1984. Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropology di Desa Pantai. Jakarta: Rajawali

Winahyu, R dan Santiasih, 1993, Pengembangan Desa Pantai, dalam Mubyarto dkk., Dua Puluh Tahun Penelitian Pedesaan. Yogyakarta: Aditya media.

https://bappenas.go.id/files/2113/5216/0318/efrizal__20091015122211__2335__0.doc

<https://dkp.bantenprov.go.id/id/read/potensi>

<http://indonesiapovertymap.org/index.php>